

IMPLEMENTASI APLIKASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT UNTUK PENINGKATAN KINERJA DAN PELAYANAN DI BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI

Lutfi Hakim¹⁾, Dianni Yusuf²⁾, Sepyan Purnama Kristanto³⁾, Dian Triana⁴⁾, Mahfudz Khoirun Nizam⁵⁾

^{1,2,3,4,5}Teknik Informatika, Politeknik Negeri Banyuwangi, Alamat, Banyuwangi, 68461
E-mail: lutfi@poliwangi.ac.id¹⁾, sepyan@poliwangi.ac.id²⁾,
dianniyusuf@poliwangi.ac.id³⁾

Abstract

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi is one of the government agencies which carries out technical and managerial guidance and training in the field of fisheries in each work area for counseling and training sessions. Every year, functional employees of this agency are required to submit a performance report in which each performance is assessed in the form of a credit score. The management of this credit score is still using the conventional method by entering data through Microsoft Excel. In addition, employee data management is still using the same method. Therefore, it is necessary to develop and implement applications that can accommodate the management of these data so these processes can run better. The implementation of the application is manifested in community service activities through three stages starting from the identification and needs analysis stage, developing the required system, system implementation and assistance.

Keywords: *application of employee management, e-dupak, web application, information system, laravel*

Abstrak

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi merupakan salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan bimbingan serta pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan pada masing-masing wilayah kerja sesi penyuluhan maupun sesi pelatihan. Dalam setiap tahunnya, pegawai fungsional dari instansi ini wajib mengirimkan laporan kinerja yang dimana setiap kinerja dinilai dalam bentuk angka kredit. Pengelolaan angka kredit ini masih menggunakan cara konvensional dengan mengisikan data melalui microsoft excel. Selain itu, pengelolaan data pegawai juga masih menggunakan cara yang sama. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan pengimplementasian aplikasi yang dapat mengakomodir dalam pengelolaan data-data tersebut sehingga kegiatan pengelolaan data pegawai dan angka kredit dapat berjalan lebih baik. Implementasi aplikasi ini diwujudkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat melalui tiga tahapan mulai dari tahap identifikasi dan analisis kebutuhan, pengembangan sistem yang dibutuhkan serta impementasi sistem dan pendampingan.

Kata Kunci: aplikasi manajemen pegawai, e-dupak, aplikasi berbasis web, sistem informasi, laravel

PENDAHULUAN

Proses pengelolaan kepegawaian dalam sebuah instansi baik itu swasta maupun pemerintah sangatlah penting. Dengan adanya sistem manajemen yang baik dan

terstruktur dengan baik, maka akan memudahkan instansi dalam melakukan pengelolaan data-data yang dibutuhkan. Selain itu, melalui penerapan aplikasi dalam sistem administrasi akan dapat meningkatkan efektivitas kinerja pegawai di sebuah instansi (Herti, 2013; Nurrani & Ferdian, 2018). Begitu pula di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pelatihan dan penyuluhan perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.27/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi berdiri pada tanggal 27 Maret 2017 yang semula bernama Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi (Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 27/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan, 2017). Tugas pokok dari balai ini adalah melaksanakan bimbingan serta pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan di masing-masing wilayah kerja sesi penyuluhan maupun sesi pelatihan.

Salah satu divisi di BPPP Banyuwangi adalah sesi penyuluhan perikanan yang dipimpin oleh seorang kepala sesi dan dibantu oleh beberapa staff sesi penyuluhan yang juga berprofesi sebagai penyuluh. Sesi penyuluhan memiliki kurang lebih 600 penyuluh yang tersebar di 2 wilayah kerja yaitu di Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Sekitar 300 diantaranya merupakan pegawai fungsional. Setiap penyuluh wajib mengirimkan laporan angka kredit penyuluhan bagi pegawai fungsional, laporan kerja, laporan biaya operasional penyuluh dan laporan indikator kinerja bulanan dalam setiap bulannya. Dokumen-dokumen tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk mengajukan kenaikan jabatan yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun atau 1 semester sekali.

Sistem pengelolaan data-data tersebut baik dalam pengelolaan data penyuluh maupun daftar usulan penetapan angka kredit hingga saat ini masih menggunakan Microsoft Excel. Penyuluh harus mengisikan satu per satu data tersebut ke dalam form excel untuk kemudian dapat diolah untuk memperoleh rekapitulasi perolehan angka kredit penyuluh. Lama proses input data berlangsung hingga 1 bulan. Pengiriman dokumen pendukung yang berisi ratusan lembar tersebut juga masih dikirim berupa *hardfile* melalui kantor jasa pengiriman antar barang. Admin balai seringkali mengalami kewalahan untuk memanajemen data, mencari tempat penyimpanan, memberikan batas

waktu pengiriman serta seringkali admin balai harus menghubungi satu per satu penyuluh melalui email untuk memberikan hasil validasi data. Berdasarkan hasil pengamatan di atas, sistem yang digunakan kurang optimal dan perlu adanya implementasi aplikasi berbasis web yang dapat menunjang pengelolaan data-data penyuluh perikanan serta pengajuan angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional.

Penerapan sistem informasi kepegawaian dilakukan oleh beberapa peneliti. Seperti yang dilakukan oleh Wasiah dkk yang menerapkan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) berbasis online di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru (Sufi & Herlinda, 2017). Selain itu, penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) juga dilakukan oleh Anuar Sadat (Sadat, 2019). Penerapan sistem informasi ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara. Penerapan sistem pengelolaan penilaian angka kredit juga telah dilakukan oleh Arbani dkk yang mengimplementasikan di Kopertis Wilayah XI Kalimantan dimana dikhususkan untuk penilaian angka kredit dosen (Arbani & Akbar, 2019). Penerapan aplikasi dan sistem informasi ini dalam kegiatan administrasi cukup membantu dalam melakukan pengolahan data sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan efektivitas dalam pengurusan administrasi.

Oleh karena itu, pada kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan implementasi aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian dan angka kredit di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang akuntabel, cepat dan transparan. Aplikasi ini dapat menjadi media pengirim dokumen pendukung dalam bentuk *softfile* sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas, serta penyuluh dapat secara langsung mengisikan daftar usulan Dupak ke aplikasi untuk kemudian dapat diolah guna memperoleh rekapitulasi angka kredit penyuluh perikanan. Selain itu, aplikasi tersebut dapat menunjang dalam pengelolaan data pegawai sehingga data-data pegawai dapat terkelola dengan baik. Harapannya dengan adanya aplikasi proses pengelolaan data pegawai dan pengajuan angka kredit penyuluh perikanan di BPPP Banyuwangi dapat berjalan dengan lebih baik.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dari kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahapan utama, diantaranya sebagai berikut:

1. Identifikasi Permasalahan dan Analisa Kebutuhan Sistem

Tahap ini merupakan tahapan awal dimana pada tahapan ini dilakukan observasi di lapangan secara langsung untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang dihadapi mitra selama ini. Pada tahap ini dilakukan wawancara langsung kepada kepala BPPP serta beberapa karyawan. Pada tahapan ini didapatkan beberapa daftar permasalahan yang didapatkan hingga akhirnya dipilih permasalahan yang paling mendesak di BPPP yakni tentang manajemen kepegawaian dan penilaian angka kredit. Tahap analisa kebutuhan sistem merupakan tahap pengumpulan informasi terkait fitur-fitur yang dibutuhkan dalam sistem.

2. Pengembangan Sistem yang dibutuhkan

Pada tahapan pengembangan sistem meliputi tahap melakukan perancangan desain aplikasi, tahap implementasi desain sistem dan tahap pengujian. Pada tahapan perancangan desain aplikasi dilakukan pembuatan desain sistem yang akan dikembangkan berdasarkan hasil yang didapatkan pada tahapan analisa kebutuhan. Pemodelan sistem dituangkan pada *Unified Modelling Language* (UML) untuk menggambarkan proses aktifitas masing-masing pengguna. Tahap pemodelan sistem terdiri dari pembuatan *Use-case diagram* dan pemodelan basis data menggunakan *Entity Relationship Diagram*. Tahapan pembuatan aplikasi merupakan implementasi dari hasil desain sistem yang diusulkan pada tahapan sebelumnya. Pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *Framework Laravel*. Selain itu juga menggunakan teknologi lain seperti HTML, *Cascading Styling Sheet* (CSS) dan *Framework Bootstrap* untuk mempercantik tampilan aplikasi dan Javascript untuk membuat aplikasi lebih interaktif. Untuk implementasi basis data, pada aplikasi yang dikembangkan menggunakan Database MySQL. Setelah tahapan pembuatan aplikasi selesai, selanjutnya adalah tahapan pengujian aplikasi. Pengujian aplikasi dilakukan dengan menggunakan metode *User Acceptance Test* yang merupakan pengujian untuk melihat fungsional aplikasi dari sisi pengguna.

3. Implementasi Sistem dan Pendampingan

Implementasi sistem merupakan proses untuk mengimplementasikan sistem manajemen kepegawaian dan penilaian angka kredit di BPPP Banyuwangi. Pada tahap ini, implementasi dilakukan dengan beberapa proses yaitu:

a. Melakukan Hosting aplikasi

Hosting merupakan tahapan untuk melakukan pengunggahan aplikasi di server agar aplikasi bisa diakses oleh pengguna melalui internet.

b. Sosialisasi dan Penyerahan Sistem

Tahap ini merupakan tahapan pengenalan aplikasi dan dan pengarahan dalam penggunaan aplikasi kepada pihak BPPP Banyuwangi serta seluruh pegawai fungsional penyuluh perikanan yang berada di 2 wilayah kerja. Melalui kegiatan ini diharapkan semua pengguna dapat menggunakan sistem dengan baik. Setelah aplikasi terunggah di server dan bisa digunakan oleh pengguna dan dilakukan sosialisasi penggunaan, maka tahapan selanjutnya adalah penyerahan aplikasi ke BPPP Banyuwangi untuk dipergunakan dalam aktivitas pengelolaan pegawai dan angka kredit melalui aplikasi.

c. Pendampingan

Tahap ini adalah pendampingan baik dalam penggunaan aplikasi untuk seluruh pegawai di BPPP Banyuwangi maupun dalam pemeliharaan sistem agar terjamin sistem keamanan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

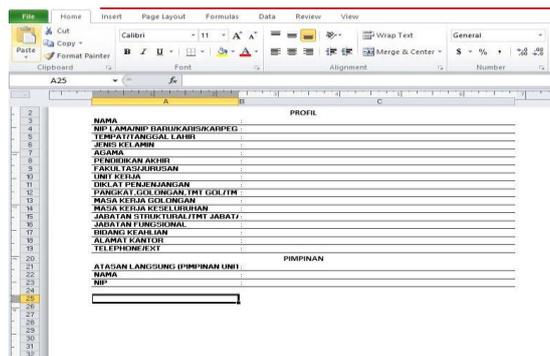
Hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Permasalahan dan Analisa Kebutuhan Sistem

Tahapan ini dilakukan secara intensif untuk mengetahui spesifikasi permasalahan yang diselesaikan. Bentuknya adalah observasi langsung dan wawancara terhadap stakeholder terkait. Hasil dari tahapan ini adalah topik masalah yang akan diselesaikan yakni berkaitan dengan pengembangan sistem informasi untuk melakukan pengelolaan kepegawaian dan angka kredit di BPPP. Setelah itu, dilanjutkan tahap analisa kebutuhan sistem dimana tahap ini melakukan observasi kebutuhan fitur yang diperlukan. Selama ini proses pengelolaan pegawai dan penilaian angka kredit di BPPP masih menggunakan excel seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.

Pada gambar 1.a dan 1.b merupakan data pribadi yang saat ini digunakan di BPPP Banyuwangi. Data tersebut merupakan salah satu data wajib yang harus dikirimkan Bersama dokumen-dokumen persyaratan pengajuan kenaikan jabatan lainnya. Adapun data yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi sistem manajemen kepegawaian

diperoleh dari wawancara kepada pihak balai dan mengikuti langsung pelaksanaan rangkaian sidang pleno Penetapan Angka Kredit Penyuluh Perikanan di BPPP Banyuwangi pada Februari 2021. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sesi Penyuluhan di BPPP Banyuwangi dijelaskan bahwa sidang pleno dilaksanakan 2 kali dalam setahun, sesi penyuluhan dan perikanan terdapat 2 jenjang pejabat fungsional, yakni pejabat ahli dan pejabat terampil. Untuk mengelola pengiriman data dari masing-masing penyuluh diperlukan adanya sebuah sistem informasi yang dapat membantu untuk mengelola data pegawai fungsional yang ada di sesi penyuluhan guna mempermudah saat pengajuan penilaian angka kredit pada sesi penyuluhan yang dimana BPPP Banyuwangi membawahi dua wilayah kerja dengan kurang lebih dari 300 penyuluh yang sudah berstatus sebagai pegawai fungsional. Sistem tersebut selain dapat membantu merekap jumlah pengajuan usulan penilaian angka kredit, juga dapat menjadi media untuk mengirim dan menyimpan bukti pengajuan yang diperlukan. Pada gambar 1.b merupakan butir kegiatan yang digunakan untuk pegawai yang mengusulkan angka kredit. Dalam penilaian angka kredit terdapat isian angka kredit berdasarkan instansi pengusul dan angka kredit berdasarkan tim penilai.



(a)

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						JUMLAH BUKTI FISIK DI AKUI	TOLAK UKUR DAN BUKTI FISIK
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	1. PENDIDIKAN								
	UNSUBR UTAMA								
	A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar								
	1. Sarjana/D.IV di bidang Perikanan						0		Lihat disini
	2. Sarjana Muda/D.III di bidang Perikanan						0		Lihat disini
	3. D.II di Bidang Perikanan						0		Lihat disini
	4. SUPM/SMK Perikanan						0		Lihat disini
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						0		
	Mengikuti diklat fungsional :								
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						0		Lihat disini
	2. Lamanya 641-960 jam						0		Lihat disini
	3. Lamanya 481-640 jam						0		Lihat disini
	4. Lamanya 161-480 jam						0		Lihat disini
	5. Lamanya 81-160 jam						0		Lihat disini
	6. Lamanya 30-80 jam						0		Lihat disini

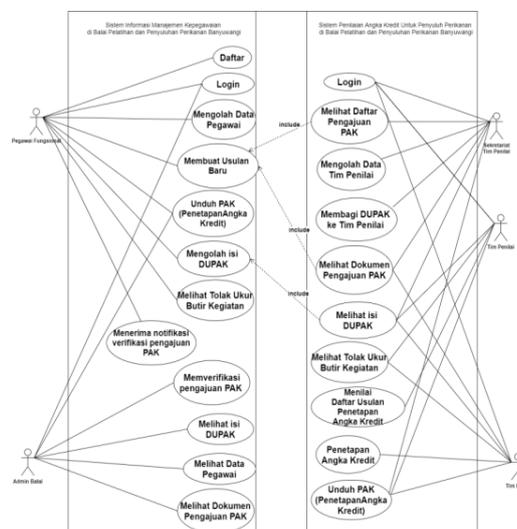
(b)

Gambar 1. (a) Data SIMPEG, (b) Butir Kegiatan Usulan Penetapan Angka Kredit

2. Pengembangan Sistem yang dibutuhkan

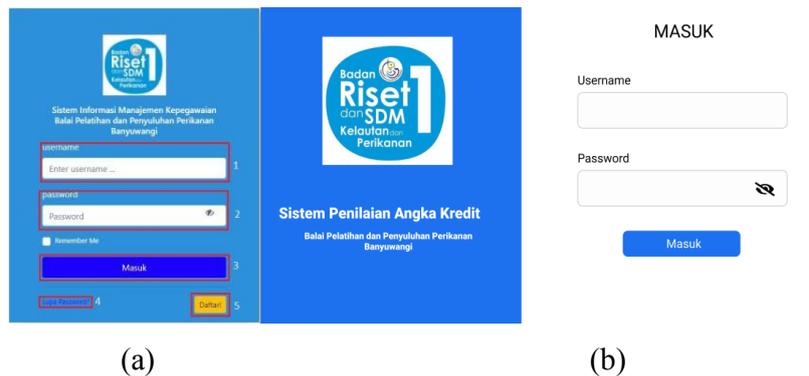
Hasil dari tahapan ini adalah sistem informasi manajemen kepegawaian dan angka kredit di BPPP Banyuwangi yang dapat membantu pegawai balai untuk melakukan pengelolaan data pegawai fungsional penyuluh perikanan pada sesi penyuluhan dan untuk penilaian serta penetapan perolehan angka kredit untuk kenaikan jabatan penyuluh perikanan yang terintegrasi satu sama lain. Hak akses pengguna dari sistem yang dikembangkan terdiri dari lima pengguna yakni admin balai dari sesi penyuluhan, pegawai fungsional penyuluh perikanan BPPP Banyuwangi, secretariat tim penilai, tim penilai dan tim pleno. Untuk gambaran pengguna dan hak aksesnya ditunjukkan pada gambar *use case diagram* pada gambar 2.

Pada *use case diagram* ditunjukkan bahwa dari masing-masing pengguna memiliki hak akses tertentu diantaranya: a) Sekretariat Tim Penilai merupakan bagian yang mengelola data pengguna penyuluh perikanan dan tim penilai serta mengelola kegiatan penyuluhan perikanan dan memonitoring DUPAK yang telah divalidasi; b) Tim Penilai merupakan bagian yang melakukan penilaian dari pengajuan DUPAK; c) Tim Pleno merupakan bagian yang melakukan penetapan angka kredit dari DUPAK yang telah dinilai oleh Tim Penilai; d) Pegawai Fungsional merupakan pengguna yang memiliki hak akses untuk melihat dan mengolah data diri maupun dokumen-dokumen usulan penetapan angka kredit. Pegawai fungsional yang dimaksud disini adalah penyuluh perikanan; serta e) Admin Balai memiliki hak akses untuk mengolah daftar usulan penetapan angka kredit penyuluh perikanan.



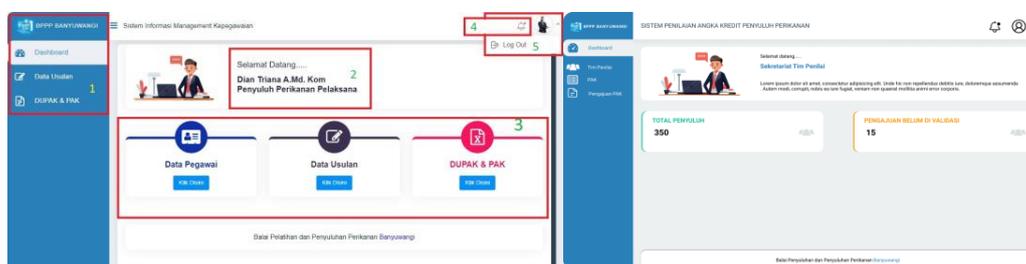
Gambar 2. *Use case diagram* dari Sistem yang dikembangkan

Untuk tampilan dari aplikasi yang dikembangkan adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Tampilan Login Aplikasi

Gambar 3 merupakan tampilan login dari aplikasi yang dikembangkan. Gambar 3a adalah tampilan login untuk bagian pengelolaan kepegawaian dimana pada bagian ini hanya bisa diakses oleh admin dan pegawai fungsional. Gambar 3b adalah tampilan login untuk bagian pengelolaan dan penilaian angka kredit dimana pada bagian ini dapat diakses oleh sekretariat tim penilai, tim penilai dan tim pleno. Setelah melakukan login, masing-masing pengguna di arahkan pada tampilan aplikasi yang ditunjukkan pada gambar 4. Pada gambar 4a merupakan tampilan aplikasi awal pada aplikasi pengelolaan pegawai. Pada bagian ini terdapat tiga menu yakni menu Dashboard, Data usulan dan menu DUPAK dan PAK, sedangkan pada gambar 4b merupakan tampilan aplikasi pada bagian pengelolaan dan penilaian angka kredit dimana pada bagian ini terdiri dari tiga menu yakni menu Dashboard, Tim Penilai, PAK dan pengajuan PAK.



Gambar 4. Tampilan Awal Aplikasi setelah login

3. Implementasi Sistem dan Pendampingan

Hasil dari tahap ini adalah aplikasi sudah di *deploy* dan dapat digunakan oleh para pengguna. Setelah itu dilakukan sosialisasi kepada pihak BPPP Banyuwangi dan seluruh pegawai fungsional penyuluh perikanan yang berada di 2 wilayah kerja. Pada kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh tim pengabdian, mahasiswa dan diikuti oleh Kepala sesi serta

seluruh pegawai fungsional yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 27 Agustus 2021. Pada sosialisasi ini sekaligus prosesi penyerahan aplikasi kepada kepala BPPP Banyuwangi yang selanjutnya agar bisa digunakan oleh para pegawai BPPP Banyuwangi.



Gambar 5. Sosialisasi dan Penyerahan Aplikasi

Implementasi sistem informasi pengelolaan kepegawaian dan penilaian angka kredit di BPPP Banyuwangi ini mendapatkan sambutan yang sangat positif dan harapan yang sangat besar oleh para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Selain itu, dengan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kepegawaian dan penilaian angka kredit sehingga dapat memotong proses bisnis yang panjang dan berulang seperti yang disampaikan oleh Kepala sesi pada saat kegiatan Sosialisasi dan penyerahan aplikasi tersebut. Peralihan sistem dari manual menjadi digital tentunya tidak serta merta dilakukan dalam satu kali kegiatan. Tentunya dalam penggunaan sistem diperlukan perawatan agar sistem dapat berjalan dengan baik dan data tersimpan dengan baik serta terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Proses pendampingan ini dilakukan secara tentatif berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh pihak Balai dalam penggunaan aplikasi.

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi manajemen kepegawaian dan sistem penilaian angka kredit di

BPPP Banyuwangi disambut sangat baik oleh para pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan. Aplikasi yang diimplementasikan adalah berbasis web yang terdiri dari lima akses pengguna yakni role akses oleh Sekretariat tim penilai, Tim penilai, Tim pleno, Pegawai fungsional dan Admin balai. Saran untuk pengembangan selanjutnya adalah dapat menambahkan layanan sistem terkomputerisasi pada bidang layanan yang lain seperti manajemen pelatihan dan sebagainya dimana semua sistem ini dapat terintegrasi menjadi satu sistem utuh sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas atau sistem manual dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kinerja dan pengelolaan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbani, & Akbar, M. (2019). Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Dosen Kopertis Wilayah XI Kalimantan. *ADMINISTRAUS - JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN*, 3(3), 93–142.
- Herti, D. (2013). Analisis pengaruh sistem informasi manajemen terhadap efektivitas kerja pegawai pada bidang sumber daya kesehatan dinas kesehatan provinsi jawa barat. *Tesis Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan*, Herti, D.(July 2016), 1–147.
- Nurrani, V. T., & Ferdian, A. (2018). Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Yayasan Pendidikan Telkom Bandung. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 11(1), 25. <https://doi.org/10.23969/jrbm.v11i1.868>
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 27/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, (2017).
- Sadat, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara. *Buletin Utama Teknik*, 14(3), 200–204. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/1273>
- Sufi, W., & Herlinda, D. (2017). Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Berbasis Online pada Bidang Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 9(2), 91–100.